



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74

Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496)

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926).

27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.040.202.200.000,00 (satu trilyun empat puluh miliar dua ratus dua juta dua ratus ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp54.689.059.000,00 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.182.059.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) terdiri dari:
- a. Pajak Hotel Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp140.500.000,00 (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp6.610.000.000,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp7,500,000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Pajak Air Rp3,000,000.00 (tiga juta rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp790,000,000.00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp1,300,000,000.00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah);
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp 367.000.000,00
(tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah)
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp 70.000.000,00
(tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp
70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp10,000,000,000.00 (sepuluh miliar rupiah) yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp32,182,059,000.00 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp699.940.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Jasa Giro Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. Pendapatan Bunga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp85,000,000.00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- g. Pendapatan dari Pengembalian Rp1.510.600.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
- h. Pendapatan BLUD Rp11.414.741.000,00 (sebelas miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp6.871.778.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp947.374.511.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp884.726.620.200,00

(delapan ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62,647,890,800.00 (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp884.726.620.200,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) terdiri dari:

- a. Dana Perimbangan Rp829.875.073.200,00 (delapan ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp327.279.844.200,00 (tiga ratus dua puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);
2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp392.551.408.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua milyar lima

ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah);

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp63.369.996.000,00 (enam puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp46.673.825.000,00 (empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp3.893.265.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - c. Dana Desa Rp50.958.282.000,00 (lima puluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp62,647,890,800.00 (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp10,620,084,200.00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh juta delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

- b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp6,249,389,300.00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp35,052,437,200.00 (tiga puluh lima miliar lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp50,651,700.00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah); dan
- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp10,675,328,400.00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.638.630.000,00 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Pendapatan hibah.

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1,035,202,200,000.00

(satu trilyun tiga puluh lima miliar dua ratus dua juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp706.770.892.970,00 (tujuh ratus enam milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp351.125.991.930,00 (tiga ratus lima puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp320.363.962.097,00 (tiga ratus dua puluh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.124.515.143,00 (dua puluh satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.156.423.800,00 (empat belas milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp351.125.991.930,00 (tiga ratus lima puluh satu milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp187.068.592.122,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah).
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp116.900.278.595,00 (seratus enam belas milyar sembilan ratus juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp38.068.470.983,00 (tiga puluh delapan

milyar enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp5.350.793.076,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah).
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp852,860,204.00 (delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus empat rupiah).
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp442,160,000.00 (empat ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - g. Belanja Pegawai BOS Rp2.142.836.950,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - h. Belanja Pegawai BLUD Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp320.363.962.097,00 (tiga ratus dua puluh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang Rp66.474.804.584,00 (enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

- b. Belanja Jasa Rp159.646.888.278,00 (seratus lima puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp14.290.718.242,00 (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp60.383.712.448,00 (enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Rp1.665.100.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp7.787.997.645,00 (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp10.114.740.900,00 (sepuluh milyar seratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp21.124.515.143,00 (dua puluh satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus lima

belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp3.652.830.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp16.948.252.300,00 (enam belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp523,432,843.00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp14.156.423.800,00 (empat belas milyar seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp318.180.000,00 (tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp13.502.243.800,00 (tiga belas

milyar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp199.239.199.810,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.570.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.526.296.520,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.862.165.957,00 (lima puluh tiga milyar delapan ratus enam

puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.332.939.750,00 (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.947.797.583,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp16.570.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil Rp2.130.000.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Lapangan Rp14.440.000.000,00 (empat belas milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp28.526.296.520,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus dua puluh

enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Besar Rp147.295.200,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp2.118.008.716,00 (dua milyar seratus delapan belas juta delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp210.500.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp650,000,000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp4.777.696.338,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp901.343.800,00 (sembilan ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp6.019.963.467,00 (enam milyar sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp1.093.803.900,00 (satu milyar sembilan

puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);

- i. Belanja Modal Komputer
Rp5.987.787.277,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu
Rp1.446.300.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga
Rp30,000,000.00 (tiga puluh juta rupiah);dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
Rp3.993.597.822,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar Rp53.862.165.957,00 (lima puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari;

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp51.914.792.624,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp1.947.373.333,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp97.332.939.750,00 (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp67.126.423.000,00 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp20.337.516.750,00 (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp8.847.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Jaringan Rp1.022.000.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (6) direncanakan

sebesar Rp2.947.797.583,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- b. Belanja Modal Biota Perairan Rp5,000,000.00 (lima juta rupiah);
- c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp88.600.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); dan
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp2.714.197.583,00 (dua milyar tujuh ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp124.192.107.220,00 (seratus dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.700.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.941.407.220,00 (seratus dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.250.700.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp 50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp122.941.407.220,00 (seratus dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu dua ratus

dua puluh rupiah) yang merupakan bantuan keuangan ke pemerintah desa.

Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp16,500,000,000.00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- e. Penerimaan pembiayaan; dan
- f. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp21,500,000,000.00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 19

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)

sebesar Rp16,500,000,000.00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah);

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp16,500,000,000.00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ranai,

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJARNAKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.018.702.200.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.689.059.000,00
4.1.01.	Pajak Daerah	12.000.000.000,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	130.000.000,00
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	130.000.000,00
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	130.000.000,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	2.000.000.000,00
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	19.000.000,00
4.1.01.08.05.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.01.08.05.0001.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.01.08.07.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	2.000.000,00
4.1.01.08.07.0001.	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	2.000.000,00
4.1.01.08.09.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.000.000,00
4.1.01.08.09.0001.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2.000.000,00
4.1.01.09.	Pajak Reklame	140.500.000,00
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	120.000.000,00
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	120.000.000,00
4.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	15.000.000,00
4.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain	15.000.000,00
4.1.01.09.03.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.000.000,00
4.1.01.09.03.0001.	Pajak Reklame Melekat/Stiker	3.000.000,00
4.1.01.09.05.	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00
4.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	6.610.000.000,00
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.610.000.000,00
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.610.000.000,00
4.1.01.11.	Pajak Parkir	7.500.000,00
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	7.500.000,00
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	7.500.000,00
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	3.000.000,00
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	3.000.000,00
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	3.000.000,00
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	790.000.000,00
4.1.01.14.05.	Pajak Batu Apung	10.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.01.14.05.0001.	Pajak Batu Apung	10.000.000,00
4.1.01.14.23.	Pajak Pasir dan Kerikil	270.000.000,00
4.1.01.14.23.0001.	Pajak Pasir dan Kerikil	270.000.000,00
4.1.01.14.24.	Pajak Pasir Kuarsa	10.000.000,00
4.1.01.14.24.0001.	Pajak Pasir Kuarsa	10.000.000,00
4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.300.000.000,00
4.1.01.15.01.	PBBP2	1.300.000.000,00
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	1.300.000.000,00
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000.000,00
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	507.000.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	367.000.000,00
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00
4.1.02.01.01.0001.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	250.000.000,00
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000.000,00
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000.000,00
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	25.000.000,00
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	25.000.000,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	70.000.000,00
4.1.02.02.10.	Retribusi Penyeberangan di Air	70.000.000,00
4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	70.000.000,00
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	70.000.000,00
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	70.000.000,00
4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	70.000.000,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.000.000.000,00
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.000.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	32.182.059.000,00
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	699.940.000,00
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	699.940.000,00
4.1.04.01.02.0002.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	699.940.000,00
4.1.04.05.	Jasa Giro	5.000.000.000,00
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.04.08.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.500.000.000,00
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	85.000.000,00
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.000.000,00
4.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2	75.000.000,00
4.1.04.12.16.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000,00
4.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	10.000.000,00
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	1.510.600.000,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.510.600.000,00
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.510.600.000,00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	11.414.741.000,00
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	11.414.741.000,00
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	11.414.741.000,00
4.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.871.778.000,00
4.1.04.18.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.871.778.000,00
4.1.04.18.01.0001.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.871.778.000,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	947.374.511.000,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	884.726.620.200,00
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	829.875.073.200,00
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	327.279.844.200,00
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	61.475.554.000,00
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	10.970.553.000,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.198.000,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	102.474.635.600,00
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	149.000.449.600,00
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.377.022.000,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	54.606.000,00
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	392.551.408.000,00
4.2.01.01.02.0001.	DAU	392.551.408.000,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.369.996.000,00
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.378.240.000,00
4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.316.918.000,00
4.2.01.01.03.0006.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.045.047.000,00
4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	9.887.084.000,00
4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.169.526.000,00
4.2.01.01.03.0018.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	736.358.000,00
4.2.01.01.03.0024.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	16.892.572.000,00
4.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	94.159.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.671.138.000,00
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.560.000.000,00
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.752.489.000,00
4.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	4.245.941.000,00
4.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.083.429.000,00
4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	537.095.000,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	46.673.825.000,00
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	20.031.809.000,00
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.113.000.000,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.337.965.000,00
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.048.840.000,00
4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	271.110.000,00
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15.676.162.000,00
4.2.01.01.04.0012.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00
4.2.01.01.04.0014.	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	117.041.000,00
4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.021.849.000,00
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00
4.2.01.01.04.0018.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	606.600.000,00
4.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	638.373.000,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	3.893.265.000,00
4.2.01.02.01.	DID	3.893.265.000,00
4.2.01.02.01.0001.	DID	3.893.265.000,00
4.2.01.05.	Dana Desa	50.958.282.000,00
4.2.01.05.01.	Dana Desa	50.958.282.000,00
4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	50.958.282.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.647.890.800,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	62.647.890.800,00
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62.647.890.800,00
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.620.084.200,00
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.249.389.300,00
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.052.437.200,00
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	50.651.700,00
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.675.328.400,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.638.630.000,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.638.630.000,00
4.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	16.638.630.000,00
4.3.03.01.01.	Pendapatan Hibah Dana BOS	16.638.630.000,00
4.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS	16.638.630.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.018.702.200.000,00
5.	BELANJA DAERAH	1.035.202.200.000,00
5.1.	BELANJA OPERASI	706.770.892.970,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	351.125.991.930,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	187.068.592.122,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	136.750.977.122,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	128.589.272.122,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	8.161.705.000,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	11.401.640.000,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.401.640.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.870.151.000,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.870.151.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.569.767.000,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.897.240.000,00
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	672.527.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.264.266.000,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.201.718.000,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	62.548.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.810.091.000,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.521.874.000,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	288.217.000,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	132.230.000,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	132.230.000,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.622.000,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.925.000,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.697.000,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.040.405.000,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.133.153.000,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	907.252.000,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	302.815.000,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	283.226.000,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	19.589.000,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	908.628.000,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	849.863.000,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	58.765.000,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	116.900.278.595,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	38.740.731.603,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	37.075.117.372,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.665.614.231,00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.802.325.320,00
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.355.819.690,00
5.1.01.02.02.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	446.505.630,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.035.194.500,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.035.194.500,00
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.498.969.300,00
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.498.969.300,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	70.823.057.872,00
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	67.654.878.081,00
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3.168.179.791,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.068.470.983,00
5.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	20.031.809.000,00
5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD	20.031.809.000,00
5.1.01.03.04.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.337.965.000,00
5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD	1.337.965.000,00
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.113.000.000,00
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.113.000.000,00
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.816.872.136,00
5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.816.872.136,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	13.439.724.247,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.201.564.247,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	145.530.000,00
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	92.630.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	329.100.600,00
5.1.01.03.08.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	317.100.600,00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	5.350.793.076,00
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	386.820.000,00
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	386.820.000,00
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.597.600,00
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.597.600,00
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	64.221.840,00
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	64.221.840,00
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	560.889.000,00
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	560.889.000,00
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.396.900,00
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	63.396.900,00
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.000.000,00
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.000.000,00
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	60.000.000,00
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	127.185.736,00
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	39.972.264,00
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	928.368,00
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.785.104,00
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	83.500.000,00
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.295.000.000,00
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.295.000.000,00
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	852.860.204,00
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.567.440,00
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.567.440,00
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	85.082.400,00
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	85.082.400,00
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.266.382,00
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.266.382,00
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	523.136,00
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	523.136,00
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	727,00
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	727,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.05.07.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	83.816.346,00
5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	83.816.346,00
5.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.443,00
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.443,00
5.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.330,00
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.330,00
5.1.01.05.10.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	625.350.000,00
5.1.01.05.10.0006.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	625.350.000,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	442.160.000,00
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	109.200.000,00
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	109.200.000,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	332.960.000,00
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	332.960.000,00
5.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	2.142.836.950,00
5.1.01.88.88.	Belanja Pegawai BOS	2.142.836.950,00
5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS	2.142.836.950,00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	300.000.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	320.363.962.097,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	66.474.804.584,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	66.442.015.094,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	65.000.000,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	750.500.000,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.808.009.027,00
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	18.960.000,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	946.100.000,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	10.440.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.294.111.095,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.163.989.120,00
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	75.000.000,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	360.500.000,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.839.870.669,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.511.159.846,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.375.227,00
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	133.000.000,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.849.194,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	816.190.298,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.391.533.380,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	163.900.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	430.681.500,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.966.504.609,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.248.824.637,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	410.340.993,00
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	48.000.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.892.730.359,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.795.052.000,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.143.118.000,00
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	15.820.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.575.366.600,00
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	82.000.000,00
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.400.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	639.050.000,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	384.340.000,00
5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.100.000,00
5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0068.	Belanja Pakaian Siaga	71.250.000,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	150.050.000,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	520.425.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	86.600.000,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	487.523.540,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	289.850.000,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	32.789.490,00
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	32.789.490,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	159.646.888.278,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	129.359.154.289,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.316.360.100,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.864.258.500,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	43.200.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.610.860.000,00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	168.100.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	64.000.000,00
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	13.158.400.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.113.538.374,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	39.700.000,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.524.800.000,00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	27.500.000,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	443.700.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.425.610.680,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33.000.000,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.350.800.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.389.360.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.875.200.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	478.500.000,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	609.400.000,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	184.000.000,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	822.400.000,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	58.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	903.217.763,00
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0045.	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	53.200.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	86.800.000,00
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	831.000.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.174.059.567,00
5.1.02.02.01.0057.	Belanja Jasa Operator Kapal	717.000.000,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	136.240.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.140.656.846,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	5.308.235.249,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	660.900.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.557.276.500,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	254.615.003,00
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	141.000.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	902.610.200,00
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	811.655.507,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.303.841.404,00
5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	15.424.277.400,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.822.206.804,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	31.047.000,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	26.310.200,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.639.089.000,00
5.1.02.02.04.0003.	Belanja Sewa Excavator	40.000.000,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	17.000.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	589.835.000,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.850.000,00
5.1.02.02.04.0038.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.500.000,00
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	722.854.000,00
5.1.02.02.04.0045.	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	3.300.000,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.560.760.000,00
5.1.02.02.04.0052.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	103.780.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	238.000.000,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.000.000,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8.000.000,00
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	202.000.000,00
5.1.02.02.04.0145.	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	41.600.000,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	7.000.000,00
5.1.02.02.04.0406.	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	48.110.000,00
5.1.02.02.04.0416.	Belanja Sewa Elektronik/Electric	1.500.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.661.155.000,00
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	758.341.000,00
5.1.02.02.05.0002.	Belanja Sewa Bangunan Gudang	260.000.000,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	139.610.000,00
5.1.02.02.05.0014.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	8.000.000,00
5.1.02.02.05.0030.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	90.000.000,00
5.1.02.02.05.0038.	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	255.000.000,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	617.204.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	289.000.000,00
5.1.02.02.05.0049.	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	2.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.05.0050.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	242.000.000,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	75.500.000,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	20.500.000,00
5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	55.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.138.938.585,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	140.000.000,00
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	3.000.000,00
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	503.200.000,00
5.1.02.02.08.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	493.138.585,00
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	600.000.000,00
5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	396.600.000,00
5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	660.000.000,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	4.000.000,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	244.000.000,00
5.1.02.02.08.0033.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	95.000.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.185.000.000,00
5.1.02.02.09.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	400.000.000,00
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	300.000.000,00
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	185.000.000,00
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	135.000.000,00
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.107.210.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.537.860.000,00
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	287.450.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	281.900.000,00
5.1.02.02.14.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	42.000.000,00
5.1.02.02.14.0002.	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	42.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	14.290.718.242,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.763.523.375,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.167.951.000,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	204.110.000,00
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	47.800.000,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	272.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.03.02.0050.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	408.270.000,00
5.1.02.03.02.0062.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	18.000.000,00
5.1.02.03.02.0086.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	48.000.000,00
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	450.981.040,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	875.853.335,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	177.500.000,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.000.000,00
5.1.02.03.02.0126.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0293.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	7.000.000,00
5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	35.000.000,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	26.000.000,00
5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	348.000.000,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	43.000.000,00
5.1.02.03.02.0446.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	318.558.000,00
5.1.02.03.02.0502.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	100.000.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.813.611.167,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.966.569.047,00
5.1.02.03.03.0002.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0004.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	60.000.000,00
5.1.02.03.03.0005.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	42.000.000,00
5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	476.000.000,00
5.1.02.03.03.0007.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	20.000.000,00
5.1.02.03.03.0008.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.900.000.000,00
5.1.02.03.03.0009.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	342.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.310.042.100,00
5.1.02.03.03.0011.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0020.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0021.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	80.000.000,00
5.1.02.03.03.0030.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0041.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	192.000.000,00
5.1.02.03.03.0042.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	20,00
5.1.02.03.03.0050.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0055.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	25.000.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.538.350.000,00
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	2.149.350.000,00
5.1.02.03.04.0015.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	192.000.000,00
5.1.02.03.04.0035.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	144.000.000,00
5.1.02.03.04.0123.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	175.233.700,00
5.1.02.03.05.0001.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	175.233.700,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	60.383.712.448,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.288.079.448,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.208.495.813,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.793.588.000,00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	285.995.635,00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	95.633.000,00
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	95.633.000,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.665.100.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.252.300.000,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	455.900.000,00
5.1.02.05.01.0003.	Belanja Beasiswa	721.400.000,00
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	75.000.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	412.800.000,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	328.500.000,00
5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	84.300.000,00
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	7.787.997.645,00
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	7.787.997.645,00
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	7.787.997.645,00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.114.740.900,00
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.114.740.900,00
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.114.740.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.05.	Belanja Hibah	21.124.515.143,00
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.652.830.000,00
5.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.652.830.000,00
5.1.05.01.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.652.830.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.948.252.300,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.519.874.800,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.315.000.000,00
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	204.874.800,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.533.377.500,00
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.576.877.500,00
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.956.500.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.895.000.000,00
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	440.000.000,00
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.455.000.000,00
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	14.156.423.800,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	318.180.000,00
5.1.06.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	318.180.000,00
5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	318.180.000,00
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	336.000.000,00
5.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	336.000.000,00
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	336.000.000,00
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	13.502.243.800,00
5.1.06.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	580.000.000,00
5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	580.000.000,00
5.1.06.03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	12.922.243.800,00
5.1.06.03.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	12.922.243.800,00
5.2.	BELANJA MODAL	199.239.199.810,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	16.570.000.000,00
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	16.570.000.000,00
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	2.130.000.000,00
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.130.000.000,00
5.2.01.01.03.	Belanja Modal Lapangan	14.440.000.000,00
5.2.01.01.03.0007.	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	7.690.000.000,00
5.2.01.01.03.0008.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	6.395.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.01.01.03.0019.	Belanja Modal Lapangan Lainnya	355.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.526.296.520,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	147.295.200,00
5.2.02.01.02.	Belanja Modal Alat Besar Apung	11.600.000,00
5.2.02.01.02.0006.	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	11.600.000,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	135.695.200,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	72.000.000,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	63.695.200,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	2.118.008.716,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.118.008.716,00
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	115.000.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	543.000.000,00
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.030.362.000,00
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	429.646.716,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	210.500.000,00
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	167.500.000,00
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	167.500.000,00
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	17.500.000,00
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	17.500.000,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	25.500.000,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	25.500.000,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	650.000.000,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	650.000.000,00
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	650.000.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.777.696.338,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	1.355.706.572,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	116.000.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.239.706.572,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.125.600.000,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	723.900.000,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	4.600.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	330.400.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.066.700.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.296.389.766,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	620.770.000,00
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	76.514.766,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	403.105.000,00
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	23.000.000,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	29.000.000,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	144.000.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	901.343.800,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	407.200.000,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.200.000,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	75.000.000,00
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	179.000.000,00
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	25.000.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	125.000.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	444.143.800,00
5.2.02.06.02.0005.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	65.000.000,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	379.143.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	50.000.000,00
5.2.02.06.04.0006.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	50.000.000,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.019.963.467,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.019.963.467,00
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.023.431.507,00
5.2.02.07.01.0002.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	2.618.110,00
5.2.02.07.01.0004.	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.499.614.000,00
5.2.02.07.01.0024.	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.494.299.850,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.093.803.900,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	123.000.000,00
5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	123.000.000,00
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	775.000.000,00
5.2.02.08.03.0009.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	200.000.000,00
5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	575.000.000,00
5.2.02.08.08.	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	195.803.900,00
5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	195.803.900,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	5.987.787.277,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	4.889.894.677,00
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	194.500.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	956.000.000,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.739.394.677,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.097.892.600,00
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	34.000.000,00
5.2.02.10.02.0002.	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	125.000.000,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	255.600.000,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	330.000.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	353.292.600,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	150.000.000,00
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	150.000.000,00
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	150.000.000,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.446.300.000,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	366.300.000,00
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	366.300.000,00
5.2.02.18.03.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	1.080.000.000,00
5.2.02.18.03.0002.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	1.080.000.000,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	30.000.000,00
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	30.000.000,00
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	30.000.000,00
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.993.597.822,00
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.993.597.822,00
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.993.597.822,00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.862.165.957,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	51.914.792.624,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.503.584.124,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.477.000.000,00
5.2.03.01.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	491.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	356.531.000,00
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	16.561.911.800,00
5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	291.000.000,00
5.2.03.01.01.0009.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.855.200.000,00
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.661.581.324,00
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	96.000.000,00
5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	7.439.600.000,00
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	201.600.000,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	681.760.000,00
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	192.000.000,00
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	197.800.000,00
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.411.208.500,00
5.2.03.01.02.0003.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	2.801.502.500,00
5.2.03.01.02.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.609.706.000,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.947.373.333,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.947.373.333,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	1.947.373.333,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.332.939.750,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	67.126.423.000,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	63.665.223.000,00
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	36.280.489.000,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	27.384.734.000,00
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	3.461.200.000,00
5.2.04.01.02.0013.	Belanja Modal Jembatan Lainnya	3.461.200.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	20.337.516.750,00
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.043.092.400,00
5.2.04.02.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	500.000.000,00
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	543.092.400,00
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.382.600.000,00
5.2.04.02.04.0001.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	830.600.000,00
5.2.04.02.04.0007.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	552.000.000,00
5.2.04.02.05.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	16.812.936.000,00
5.2.04.02.05.0004.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	16.812.936.000,00
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	900.000.000,00
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	900.000.000,00
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	198.888.350,00
5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	148.888.350,00
5.2.04.02.07.0004.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	50.000.000,00
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	8.847.000.000,00
5.2.04.03.01.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.379.800.000,00
5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.379.800.000,00
5.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	822.800.000,00
5.2.04.03.03.0002.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	640.500.000,00
5.2.04.03.03.0003.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	182.300.000,00
5.2.04.03.04.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	1.527.000.000,00
5.2.04.03.04.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	1.527.000.000,00
5.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	20.000.000,00
5.2.04.03.05.0012.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	20.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.04.03.09.	Belanja Modal Instalasi Pengaman	4.097.400.000,00
5.2.04.03.09.0004.	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	4.097.400.000,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	1.022.000.000,00
5.2.04.04.01.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	20.000.000,00
5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	20.000.000,00
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.002.000.000,00
5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.002.000.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.947.797.583,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	140.000.000,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	75.000.000,00
5.2.05.01.01.0012.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	75.000.000,00
5.2.05.01.02.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	65.000.000,00
5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	65.000.000,00
5.2.05.04.	Belanja Modal Biota Perairan	5.000.000,00
5.2.05.04.01.	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	5.000.000,00
5.2.05.04.01.0001.	Belanja Modal Ikan Budidaya	5.000.000,00
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	88.600.000,00
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	88.600.000,00
5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	88.600.000,00
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.714.197.583,00
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.714.197.583,00
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.714.197.583,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	124.192.107.220,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.250.700.000,00
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.200.000.000,00
5.4.01.01.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.200.000.000,00
5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.200.000.000,00
5.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	50.700.000,00
5.4.01.02.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	50.700.000,00
5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	50.700.000,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	122.941.407.220,00
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	122.941.407.220,00
5.4.02.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	71.983.125.220,00
5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	71.983.125.220,00
5.4.02.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.958.282.000,00
5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	50.958.282.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.035.202.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.500.000.000,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	16.500.000.000,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.500.000.000,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.500.000.000,00
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	21.500.000.000,00
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	21.500.000.000,00
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	21.500.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.500.000.000,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00
6.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	16.500.000.000,00
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

Ranai,
BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI